

ABSTRAK

Rae Sita Isalda Amory (1215010160): *Peran Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI) dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Tahun 2007-2024.*

Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) merupakan lembaga non-struktural yang memiliki fungsi memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Meskipun secara konstitusional keberadaannya diakui, namun peran aktual Wantimpres kerap dianggap kabur dan kurang terdengar oleh publik. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas lembaga tersebut dalam mendukung sistem pemerintahan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua hal pokok, yaitu bagaimana sejarah berdirinya Wantimpres dan bagaimana peran Wantimpres dalam sistem pemerintahan Indonesia pada kurun waktu 2007 hingga 2024. Dengan fokus waktu yang cukup panjang, penelitian ini menyoroti berbagai masa pemerintahan mulai dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akar sejarah berdirinya Wantimpres dan untuk menganalisis peran dalam proses pengambilan pertimbangan. Penelitian ini juga ingin mengungkap apakah Wantimpres hanya bersifat formalitas atau memiliki peran substansial dalam kebijakan negara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah dengan empat tahap utama, yaitu heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber (evaluasi otentisitas dan kredibilitas), interpretasi (penafsiran terhadap fakta sejarah), dan historiografi (penulisan sejarah).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Wantimpres tidak selalu menonjol dalam ruang publik, namun keberadaannya memiliki nilai strategis, terutama dalam menyerap aspirasi masyarakat dan memberikan masukan terhadap isu-isu strategis. Pada masa pemerintahan Presiden SBY, Wantimpres berperan aktif dalam merespons krisis global 2008 dan isu-isu strategis seperti krisis energi, pangan, dan stabilitas politik. Sementara pada era Joko Widodo, Wantimpres lebih banyak diisi oleh tokoh agama, pengusaha, dan budayawan yang memberikan masukan dalam isu toleransi, ekonomi, dan kebangsaan. Namun demikian, karena sifat pertimbangan Wantimpres yang tertutup dan hanya ditujukan kepada Presiden, maka tingkat akuntabilitas publiknya tergolong rendah. Secara keseluruhan, Wantimpres berperan sebagai lembaga penasihat yang bersifat reflektif dan selektif, dengan tantangan utama pada transparansi dan efektivitas dalam tatanan pemerintahan yang demokratis.